



Meski Dievaluasi, Jalur Sepeda Dipertahankan

JAKARTA, KOMPAS — Keberadaan jalur sepeda dan pedestrian tetap dibutuhkan untuk mendukung integrasi transportasi publik di Jakarta yang berkembang pesat. Jalur sepeda yang sudah terbangun pun tetap dipertahankan. Namun, evaluasi dibutuhkan agar jalur sepeda berguna bagi warga.

Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Manuara Siahaan, mendukung evaluasi jalur sepeda di Ibu Kota. Evaluasi akan fokus pada perpindahan warga dari kendaraan bermotor ke sepeda, keselamatan pesepeda di jalur sepeda tanpa proteksi dan terproteksi, dampak terhadap pengurangan emisi gas buang, dan pengurangan kemacetan.

"Selama saya di Komisi B belum ada evaluasi jalur sepeda. Jadi, untuk 2023 akan dilakukan kajian sekaligus evaluasi. Sementara jalur yang sudah terbangun tetap dipertahankan," ucap anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (15/11/2022).

Dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta di Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/11), anggaran pembangunan jalur sepeda Rp 38 miliar tahun 2023 dihapus. Pemerintah masih harus mengevaluasi jalur sepeda yang sudah terbangun secara komprehensif.

Evaluasi yang nantinya dilakukan tanpa memakai biaya dari APBD DKI itu akan melibatkan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2022 menargetkan 301,084 kilometer jalur sepeda terbangun.

Menurut Manuara, evaluasi

jalur sepeda harus melibatkan unsur akademisi, komunitas atau masyarakat, dan penyelenggara transportasi darat supaya polemik jalur sepeda diselesaikan komprehensif. Peran Komisi B DPRD DKI Jakarta nanti adalah menilai obyektivitas hasil evaluasi. "Tidak boleh pelaksana kajian hanya melibatkan satu sisi (ITDP) saja," ujarnya.

Bike to Work Indonesia juga mendukung evaluasi jalur sepeda. Namun, evaluasi bukan berarti meniadakan anggaran pembangunan jalur sepeda karena program ini merupakan warisan yang mendukung peralihan dari pembangunan berorientasi mobil ke mobilitas aktif dan berbasis transit.

Dilanjutkan

Fahmi Saimima, Ketua Umum Bike to Work Indonesia, menyebutkan, program yang baik mestinya dijaga dan dilanjutkan. Apalagi, anggaran itu bersumber dari pajak warga kota Jakarta.

Bike to Work menyarankan evaluasi jalur sepeda secara menyeluruh agar meniru kesuksesan Transjakarta. Evaluasi dimulai dari edukasi, sosialisasi, dan promosi jalur sepeda; fungsi; hingga manfaatnya bagi warga.

Selanjutnya, harus ada evaluasi regulasi dan penindakan berupa sanksi bagi pelanggaran di jalur sepeda. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan DKI Jakarta harus berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta dan kepolisian untuk penindakan.

"Evaluasi teknis juga penting. Dimulai dari mendata dan me-

nyurvei jalur sepeda mana saja yang ideal, dimanfaatkan dengan baik, sering digunakan, bersinggungan dengan kendaraan lain atau tidak, dan lainnya," katanya.

Pengajar transportasi publik Universitas Indonesia, Ellen SW Tangkudung, yang dihubungi terpisah mengatakan, jaringan transportasi publik, seperti Transjakarta, LRT, dan MRT, harus didukung jalur sepeda dan pedestrian. Sejak ada jalur sepeda di Jakarta, jumlah pesepeda pun kian bertambah.

"Jalur sepeda yang ada sekarang ini harusnya memang dievaluasi. Digunakannya seperti apa, karena jalur sepeda yang dimaksud itu adalah jalur sepeda untuk kegiatan bertransportasi," ujar Ellen.

(VAN/DAN)